

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT <b>NOV</b> DES 1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : B-10		TAHUN 2006

# Kontrak rig berbuah sengketa

Oleh Tri D. PAMENAN  
Wartawan Bisnis Indonesia

Keuntungan yang sudah dibayangkan oleh ConocoPhilips dan PT Sapta Sarana Personaprima dalam mengelola proyek pengeboran minyak dan gas bumi akhirnya sirna sudah. Kejuanya kini malah berseteru di pengadilan.

**A**walnya, Conoco-Philips dan PT Sapta Sarana Personaprima bersepakat melakukan kerja sama dalam penyediaan rig untuk proyek pengeboran minyak dan gas bumi pada ladang minyak di Corridor Block, sebelah barat laut kota Palembang.

Kedua perusahaan kemudian menandatangani kontrak *Rig Management Services* pada 1 Agustus 2001.

Sesuai dengan Amendemen No.1 *Rig Management Services*, disepakati bahwa tanggal permulaan operasional kerja Sapta berlaku mulai 24 Oktober 2001.

Dalam klausul kontrak, Sapta berkeajiban mendatangkan rig untuk pengeboran minyak dan gas bumi dan mengoperasikannya untuk kepentingan eksploitasi Conoco.

Pada pelaksanaannya, telah terjadi beberapa perubahan permintaan atas rig yang diperlukan.

Menurut versi Conoco, perubahan itu terjadi karena rig yang disediakan Sapta tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Sapta seharusnya sudah harus didatangkan sebelum April 2002, namun ternyata baru bisa dipenuhi pada 11 Agustus 2002.

Singkat cerita, kegagalan Sapta memenuhi kontrak tersebut akhirnya membuat Conoco mengalami kerugian, baik dari utang yang belum dibayar, kewajiban penalti, maupun kerugian langsung. Total kerugian yang dicatat oleh Conoco sebesar US\$5,19 juta (sekitar Rp49 miliar). Conoco lalu menghentikan kontrak dengan Sapta pada 7 Februari 2003.

Belakangan, Sapta memang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 5 Februari 2004. Maka, sengketa antara kedua perusahaan

itupun akhirnya berbuntut ke pengadilan.

Randy Rizaldy yang ditunjuk menjadi kurator PT Sapta oleh Pengadilan Niaga kemudian malah menggugat Conoco karena melakukan perbuatan melawan hukum. Sapta kemudian menunjuk kantor pengacara OC Kaligis & Partners sebagai kuasa hukum. Gugatan diajukan pada 8 Agustus 2006.

Alasan gugatan yang diajukan adalah karena amendemen dan

pembatalan kontrak dianggap merugikan Sapta hingga akhirnya perusahaan itu menuntut Conoco untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US\$27,18 juta dan Rp4,02 miliar, serta ganti rugi immateriil sebesar US\$100 juta.

Dalam persidangan, kuasa hukum ConocoPhilips Todung Mulya Lubis meminta Pengadilan Negeri Jakpus untuk menolak gugatan perdata yang diajukan PT Sapta.

"Kami mengharapkan agar Majelis Hakim dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Jangan sampai keputusan yang diambil dalam kasus ini justru membuat investor asing henggang dari Indonesia," ujar dia.

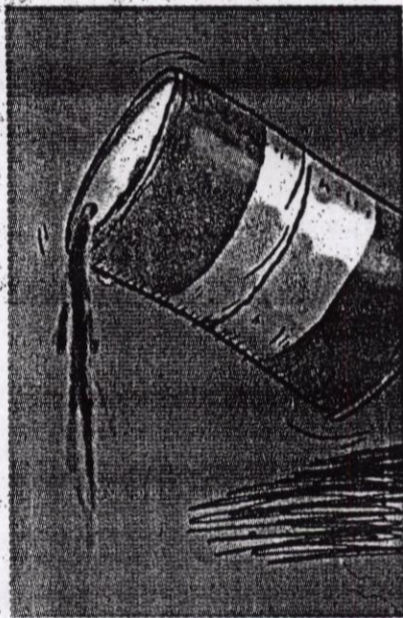
## Tak penuhi syarat?

Dalam kesimpulannya, pihak ConocoPhilips menyatakan bahwa gugatan Sapta tidak memenuhi syarat yang layak untuk diterima oleh Pengadilan Negeri antara lain karena empat hal.

*Pertama*, gugatan yang disam-

di bawah kontrol Pertamina, melainkan di bawah lembaga birokrasi baru (BP Migas).

Saat ini, tidak ada mekanisme kontrol terhadap kegiatan BP Migas sementara pemerintah dan publik tidak mempunyai alat untuk mengontrol kinerjanya. Padahal semua proses *cost recovery* diserahkan sepenuhnya ke lembaga ini, mulai dari perencanaan anggaran oleh KPS yang memerlukan persetujuan dari BP Migas, realisasi anggaran lewat tender yang diselenggarakan BP Migas, persetujuan atas realisasi anggaran KPS sampai kepada persetujuan atas *cost*



*recovery* yang dibayar negara semua di bawah kewenangan BP Migas. Di sini peluang *mark up* dan kongkalikong sangat terbuka lebar.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, yang mengontrol KPS adalah Pertamina yang merupakan sebuah perusahaan. Mekanisme kontrol terhadap *cost recovery* dilakukan secara sistematis melalui Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) yang terdiri

dari empat menteri (menteri keuangan, menteri ESDM, menteri/Ketua Bappenas, dan mensesneg).

Dengan berbagai kelemahannya, Pertamina sebagai sebuah perusahaan setiap tahun mengeluarkan *balance sheet*, *income statement* dari laporan tahunan yang bisa dipakai pemerintah dan publik untuk mengontrol Pertamina. Karena BP Migas bukan perusahaan, lembaga ini tidak mempunyai Dewan komisaris dan tidak mempunyai laporan keuangan sebagai prasarana untuk mengontrol kegiatannya.

Meskipun tentu saja peluang korupsi, *mark up* dan kongkalikong tetap ada, namun peluang tersebut jauh lebih kecil daripada di bawah sebuah lembaga pemerintah nonperusahaan, yang mekanisme kontrolnya tidak ada.

Produksi minyak nasional terus mengalami penurunan karena rendahnya tingkat investasi eksplorasi sebagai dampak dari UU Migas yang menerapkan sistem manajemen 'banyak atap' dan pembebanan pajak kepada investor yang sangat berlebihan di mana mereka harus bayar berbagai macam pajak dan pungutan meskipun belum menemukan migas (masih pada tahap eksplorasi).

Akibatnya, penemuan cadangan baru menjadi sangat langka, padahal menurut para geologis sumber daya minyak di perut bumi masih sangat besar (sekitar 80 miliar barel).

Pada tahun 2006 ini produksi kembali menembus titik nadir yang baru sekitar 1.03 juta barel/hari, sehingga target APBN 2006 yang sudah sangat rendah yang hanya sekitar 1,05 juta barel/hari nyaris pasti akan gagal dicapai. Yang meningkat adalah *cost recovery*, dari sekitar US\$3,7 miliar pada tahun 1999, membengkak menjadi sekitar US\$9,0 miliar pada tahun 2006. Oleh karenanya, solusi yang rasional adalah perlu segera meninjau kembali keberadaan BP Migas karena sudah terbukti *cost recovery* tidak mampu diturunkan dan produksi gagal ditingkatkan. Bersediakah pemerintah meninjau ulang keberadaan BP Migas?

\*\*\*

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A. 2

TAHUN 2006

# Meninjau Kembali

## BP Migas

Oleh  
Kurtubi

Widyaiswara Lemhannas, Jakarta

DARI lima perusahaan minyak kontraktor *production sharing* (KPS) yang diaudit untuk periode 2004-2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar US\$2,53 miliar (sekitar Rp23 triliun). Potensi kerugian itu boleh jadi akan membengkak apabila BPK mengaudit seluruh perusahaan KPS di Indonesia.

Dalam laporannya, BPK menemukan adanya biaya-biaya dari Kantor Pusat KPS di luar Indonesia yang dibebankan sebagai *cost recovery* atas lapangan yang dioperasikannya di Indonesia. Biaya *community development and community relationship* ternyata dibebankan juga ke negara.

Demikian juga sumbangan KPS untuk *international school* mungkin terjadi karena ada anak pegawai KPS yang bersekolah di sana. Juga sumbangan untuk korban tsunami dan gempa bumi sangatlah tidak etis untuk dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Hakikat dari sistem KPS yang dipelopori Indonesia sejak tahun 1960-an kemudian diikuti hampir semua negara produsen minyak di dunia adalah negara memberikan hak kepada investor untuk melakukan pencarian migas (eksplorasi) dengan biaya dan risiko sepenuhnya ditanggung investor.

Apabila investor berhasil menemukan dan memproduksi migas, lewat mekanisme *cost recovery*, investor berhak meminta penggantian (lewat pemotongan produksi) atas biaya-biaya eksplorasi dan biaya dan biaya eksploitasi dari lapangan yang ditemukannya.

Di sini tentu tidak berarti bahwa KPS dengan bebas dapat memasukkan segala pengeluarannya lewat *cost recovery*, sehingga ibaratnya pengeluaran untuk beli rokok dan tisu pun dibeban-

kan atas biaya negara.

Kalau hasil audit BPK tersebut benar, hal ini sangatlah disayangkan, mengingat KPS yang telah berproduksi sebenarnya telah memperoleh bagian keuntungan (15%) dari hasil produksi setelah dipotong biaya eksplorasi dan eksploitasi.

Setelah UU Migas No 22/2001, BP Migas bertanggung jawab menjaga agar biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan minyak (KPS) tidak di-*mark up* serta tidak memasukkan dan menyetujui semua *cost recovery* yang diusulkan KPS, terlebih semua biaya pembangunan fasilitas eksplorasi dan eksploitasi sudah dikembalikan ke KPS karena sekitar 90% dari produksi minyak saat ini berasal dari lapangan yang sudah tua.

Berdasarkan hasil audit BPK di atas, terlihat bahwa keberadaan BP Migas perlu dipertanyakan. Selain itu, jumlah *cost recovery* secara keseluruhan yang dibayar negara terus membengkak setiap tahun sedangkan produksi terus anjlok.

Sesuai dengan ciri investasi perminyakan, yakni ketika *fixed cost* yang sangat besar (dan *variable cost* yang relatif kecil), seperti biaya pembangunan fasilitas/ anjungan produksi lepas pantai yang banyak membutuhkan besi baja, *cost recovery* seyogiannya akan menurun drastis dengan bertambahnya usia lapangan. Sedangkan biaya *variable* untuk mengoperasikan produksi di lapangan relatif kecil tergantung pada tingkat produksi.

Namun data menunjukkan bahwa pada tahun 1999 *cost recovery* masih sekitar US\$3,7 miliar dengan produksi sekitar 1.5 juta barel/hari. Pada saat itu, manajemen industri migas nasional masih menggunakan UU No 8/1971 yakni semua KPS masih di bawah kontrol Pertamina dan dengan menteri yang membawahi sektor migas yakni SBY (kini Presiden RI).

Sejak tahun 2000, menteri yang membawahi sektor migas dijabat Purnomo Yusgiantoro dan sejak tahun 2001 berlaku UU Migas yakni KPS tidak lagi

45



Sumber: BPH Migas

Dengan semakin maraknya SPBU, konsumen pun memiliki pilihan lebih banyak untuk membeli BBM. Karena itu, masalah pelayanan akan menjadi modal utama bagi investor untuk menarik konsumen. Agar tertarik, SPBU pun disulap desainnya menjadi pola terpadu. Konsep penggabungan dilakukan antara pemenuhan kebutuhan BBM dengan kebutuhan lain seperti restoran serta minimarket.

Timbul pertanyaan, apakah Pertamina sanggup melawan? Dengan moto Pertamina Way, sang juru bicara Toharso mengatakan, perusahaannya siap melawan agresivitas kompetitor. "Pas literan, pas layanan, pas waktu, pas mutu. Coba Anda rasakan bagaimana pelayanan SPBU kami di rest area Tol Cikampek atau yang baru di Gatot Subroto," ujar Toharso.

Disinggung tentang layanan mitra kerja Pertamina yang kurang memuaskan, dia mengaku tidak khawatir. Dengan keberadaan SPBU kompetitor, pengusaha akan berpikir sendiri supaya SPBU-nya tidak ditinggalkan konsumen.

Namun, Toharso mengingatkan agar pembangunan SPBU oleh swasta nasional atau asing tidak hanya berkonsentrasi pada jalur "gemuk". Mereka harus pula membangun infrastrukturnya di luar Pulau Jawa sehingga ada pemerataan penyebaran BBM di Nusantara.

PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN NIAGA UMUM SPBU			
No	Nama Perusahaan	Nilai Investasi	Lokasi
1	PT Sigma Rancang Perdana	USD250 juta	Jakarta
2	PT Krida Petra Graha	USD35 juta	Jakarta
3	PT Petronas Niaga Indonesia	USD30 juta	Jakarta
4	PT Petroleum Limas	USD9,8 juta	Jakarta
5	PT Elnusa Harapan	USD4 juta	Jakarta
6	PT Pandu Selaras/Petros	USD4 juta	Jakarta
7	PT Raven Sejahtera	USD1,3 juta	Jakarta
8	PT Elnusa Petrofin	USD1,3 juta	Jakarta
9	PT Jasa Angkasa Semesta	na	Jakarta
10	PT Petroleum Sukses	na	Jakarta
11	PT Petro Andalan Nusantara	na	Medan
12	PT Duta Karya Industri	na	Jakarta
13	PT Jasatama Petroindo	na	Jakarta
14	PT Petro Sakti Persada	na	Jakarta
15	PT Iranaco Utama	na	Jakarta
16	PT Aneka Kimia Raya Corporindo	na	Jakarta
17	PT Cosmic Indonesia	na	Batam
18	PT Premindo Mitra Kencana	na	Jakarta

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

Sebenarnya, BPH Migas pernah mengungkapkan rencana pembuatan aturan yang meminta investor turut juga membangun SPBU di luar Jawa. Namun, hingga kini belum terdengar adanya pembangunan unit SPBU swasta di pulau-pulau lain. Padahal, berita peresmian SPBU baru di Jabodetabek semakin marak. Mungkin, pasar di Pulau Jawa lebih menjanjikan dibandingkan pulau lain. Sekitar 70% konsumsi BBM ada di Pulau Jawa. Karena tidak menarik, menurut Toharso, memang diperlukan suatu regulasi yang mendorong investor berusaha selain di Jawa.

Hal serupa diungkapkan pengamat perminyakan Kurtubi. Dia menilai, idealnya mereka juga harus merasakan pahitnya berusaha di sektor hilir migas seperti yang dialami Per-

tamina selama ini. Sayang, karena nilai ekonominya tidak menjanjikan, investor enggan menanamkan modal.

"Saya pikir perlu regulasi untuk mendesak pendatang baru ini untuk juga berada untung di luar wilayah gemuk. Misalnya dengan mengharuskan membangun dua SPBU di pulau lain setiap pembangunan 20 SPBU di Jawa," harapnya. Tanpa regulasi, tambah Kurtubi, sulit rasanya menunggu kesadaran dari para pengusaha.

Dalam pembangunan SPBU dengan pola kerjasama, adahambatan yang ditemui pengusaha. Yang paling krusial adalah masalah bagi hasil yang sangat minim sehingga menyulitkan pengusaha untuk cepat mengembalikan modal. Pasalnya, persentase bagi hasil hanya berkisar 4%.

(muhammad iqbal/CR03)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

# Pendatang Baru di Jalur Gemuk

TONO, 26, pemilik pangkalan bensin eceran pinggir jalan di Jln Warung Buncit kini harus memikirkan usaha baru. Pasalnya, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah menjamur dan mendekati area pangsa pasarnya. Pangkalan bensin ecerannya terjebak di antara SPBU yang baru dibangun.

Memang, belakangan pembangunan unit SPBU mengalami peningkatan cukup signifikan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Yang dibangun tidak hanya mengusung logo PT Pertamina, ada juga cangkang kuning logo Shell serta tetesan bensin warna hijau ciri khas Petronas, Malaysia.

Karena, berdasarkan Undang-Undang (UU) No22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), pemerintah telah menghalalkan pembangunan SPBU oleh swasta nasional maupun asing. Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas mencatat ada pengajuan izin dari lebih dari 100 perusahaan untuk bergerak di bisnis pengolahan, pengangkutan, penyimpanan hingga tingkat eceran migas.

Setidaknya, ada delapan investor yang akan bertarung di tingkat eceran dengan membawa duit jutaan dolar. Di antaranya Royal Dutch Shell (USD250 juta), Beyond Petroleum, Petronas (USD30 juta),

PT Elnusa Harapan (USD4 juta), PT Raven Sejahtera (USD1,3 juta), serta Petroleum Limas (USD9,8 juta).

Pengoperasian perdana unit SPBU milik Shell di Karawaci, Tangerang, merupakan "tanda" liberalisasi migas di Indonesia. Wakil Presiden Shell Indonesia Bidang Eksternal dan Urusan Bisnis Wally Saleh mengatakan, pasar Indonesia masih sangat menjanjikan. Terlebih, Shell mempunyai pengalaman mengelola perusahaan secara profesional dari sektor hulu hingga hilir.

Menurut Wally, secara bisnis prospeknya sangat cerah. Terlebih jika pemerintah kembali

menaikkan harga BBM sehingga harga produk menjadi sangat kompetitif. Hal ini, lanjutnya, membuat Shell tentu tidak hanya dilirik mobil-mobil mewah, tapi juga mobil kelas menengah ke bawah.

Apa yang diungkapkan perwakilan Shell itu memang ada benarnya. Sekarang saja, dengan hargaminyak mentah dunia yang terus mengalami penurunan, produk sekelas Pertamina dan Pertamina Plus ikut mengalami penurunan. Bahkan, mendekati harga premium dan solar bersubsidi. Efeknya, masyarakat konsumen mulai mencoba BBM

satu tingkat dari premium itu.

Sementara dari sisi pangsa pasar, industriomotif Indonesia merupakan pasar yang sangat luas. Pertumbuhan kendaraan roda empat di Jakarta per tahun mencapai lebih dari 200.000 unit. Belum lagi kendaraan roda dua yang tercatat Departemen Perhubungan hingga 2004 berjumlah 24 juta unit.

Bandingkan dengan Kuala Lumpur yang pertumbuhan kendaraan roda empatnya hanya 50.000 unit per tahun. Dari sudut konsumsi, setiap tahun lebih dari 60 juta kiloliter BBM dibakar untuk keperluan transportasi.

Jumlah konsumen yang besar itu menjadi bertambah potensial, sebab tidak sebanding dengan jumlah SPBU yang tersedia. Untuk saat ini, jumlah SPBU yang dikelola Pertamina hanya berkisar 3.000-an di seluruh Indonesia. Sementara, menurut Pertamina, dibutuhkan setidaknya 1.000 SPBU baru setiap tahun.

Melihat potensi itu, investor berlomba-lomba membangun SPBU. Shell mengungkapkan akan membangun minimal 400 SPBU dan Petronas hingga akhir 2010 akan mendirikan 200 unit. Pertamina pun tidak tinggal diam. Perusahaan pelat merah ini berencana membangun 300 unit dengan biaya investasi lebih dari Rp1 triliun.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALA

DISTRIBUSIKAN BBM BERSUBSIDI

2006

# Pertamina Bersedia Gandeng Swasta

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan badan usaha lain dalam pengadaan BBM bersubsidi pada 2007.

"Kami siap saja bekerja sama dengan badan usaha lain apakah Shell, Petronas atau lainnya," kata Deputy Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya usai dengar pendapat publik (*public hearing*) BPH Migas mengenai pengadaan BBM bersubsidi tahun 2007 yang dihadiri sejumlah perusahaan di sektor hilir migas di Jakarta, Selasa (7/11).

Menurut Hanung, sejumlah perusahaan seperti Shell dan Petronas sudah lama menyatakan keinginannya bekerja sama dalam pengadaan BBM bersubsidi. "Kami *welcome* karena bisa saling menguntungkan," ujarnya.

BPH Migas tengah mengkaji penunjukan langsung kepada Pertamina dalam pengadaan BBM bersubsidi tahun 2007 dengan memberi kesempatan badan usaha lain bekerja sama dengan BUMN itu secara *business to business* (b to b).

Pada 2007, pemerintah kemungkinan besar masih akan menunjuk langsung Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi mengingat badan usaha lain belum ada yang siap. Tahun lalu, Pertamina juga ditunjuk langsung sebagai satu-satunya badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi dengan besaran alpha (biaya distribusi dan marjin) ditetapkan pemerintah.

Dalam *public hearing* itu juga diketahui, sampai saat ini belum ada badan usaha selain Pertamina yang memenuhi persyaratan baik penunjukan langsung maupun lelang sesuai Peraturan BPH Migas No 09 Tahun 2005 khususnya ketersediaan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

## Equal Treatment

Dalam forum itu sejumlah badan usaha selain Pertamina menyatakan keinginannya ikut serta menyalurkan BBM bersubsidi. Sesuai Perpres No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, BPH Migas dapat melakukan penunjukan langsung atau lelang dalam penyediaan BBM bersubsidi.

Namun, sesuai Peraturan BPH Migas No 09 Tahun 2005, baik pengadaan BBM bersubsidi yang melalui penugasan langsung ataupun lelang, badan usaha yang berminat diwajibkan menguasai dua wilayah distribusi niaga (WDN).

"Hingga saat ini, tampaknya belum ada menguasai dua WDN, sehingga Pertamina akan menyalurkan BBM bersubsidi lagi tahun 2007," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

BPH Migas membagi wilayah pendistribusian BBM bersubsidi dalam empat WDN yakni I adalah Sumatera, II untuk Jawa dan Bali, III untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan

Irian Jaya, serta IV yakni NTT dan NTB. Dalam *public hearing* tersebut muncul pula keinginan agar BPH Migas merevisi persyaratan penguasaan dua WDN itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Purnomo Yusgiantoro meminta BPHN Migas tetap memberlakukan perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi Pertamina maupun swasta yang hendak mengikuti tender PSO.

Purnomo mengatakan, siapapun yang akan mengikuti tender hak penyaluran tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang selama ini telah dilakukan Pertamina. "Prinsipnya harus *equal treatment*, misalnya Pertamina bangun *storage*, swasta juga. Kalau ternyata dia (swasta, red) tidak punya tapi ikut tender, itu tidak *fair*," katanya.

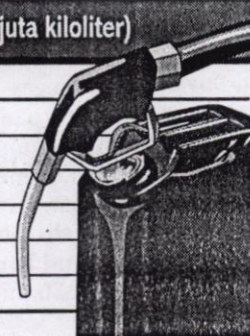
Menurut Purnomo, teknis tender akan dilakukan BPH Migas yang diharapkan dalam waktu dekat ini harus segera direalisasikan. Namun, hingga saat ini memang Pertamina masih dianggap yang paling mampu untuk menjadi pemegang PSO. "Tapi lihat aja nanti, apakah 2007 memang Pertamina, yang jelas kalau swasta mau masuk harus bisa setara kualitasnya dengan Pertamina," katanya.

(c94/ari)

Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2005-2007 (juta kiloliter)

Jenis BBM	2005	2006	2007
Premium	15,17	17,1	17,46
Minyak Tanah	10,5	9,9	9,51
Minyak Solar	26,3	11	12,84
Minyak Diesel	1,297	-	-
Minyak Bakar	6,365	-	-
Total	59,63	37,9	39,81

Sumber : Pertamina, DESDM, BPH Migas



43

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2006

# Warga Mulai Mengantre untuk Peroleh Minyak Tanah

## Kelangkaan Terasa Sejak Pertengahan Ramadan

KARAWANG, (PR).-

Masyarakat di beberapa kecamatan di Kab. Karawang sejak beberapa hari terakhir ini mulai kesulitan memperoleh minyak tanah. Hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah, warga terpaksa antre menanti pasokan tiba ke daerahnya.

Dari pantauan "PR", kecamatan yang mengalami kelangkaan minyak tanah di antaranya Kec. Rengasdengklok, Batujaya dan Tirtajaya. Di tiga kecamatan yang terletak di bagian utara Karawang itu, minyak tanah disebut-sebut sulit didapat sejak pertengahan Oktober lalu. Kondisi seperti itu, berlangsung hingga sekarang.

"Sebelum Lebaran tiba, warga di sini kesulitan memperoleh minyak tanah. Jika pun ada, harganya mencapai Rp 3.000,00/liter. Padahal, sebelumnya hanya Rp 2.300,00/liter," ujar Ny. Iyah (35), pemilik warung di Kampung Tangkolo Desa Srijaya Kec. Tirtajaya, saat menerima kunjungan Komisi B DPRD Karawang, Selasa (7/11).

Keluhan serupa dikatakan pula oleh Ranta (50) warga Kampung Bojong Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok. Menurut dia, pasokan minyak tanah ke desanya tersendat sejak pertengahan Ramadan lalu.

Warga harus antre di pangkalan minyak tanah yang ada

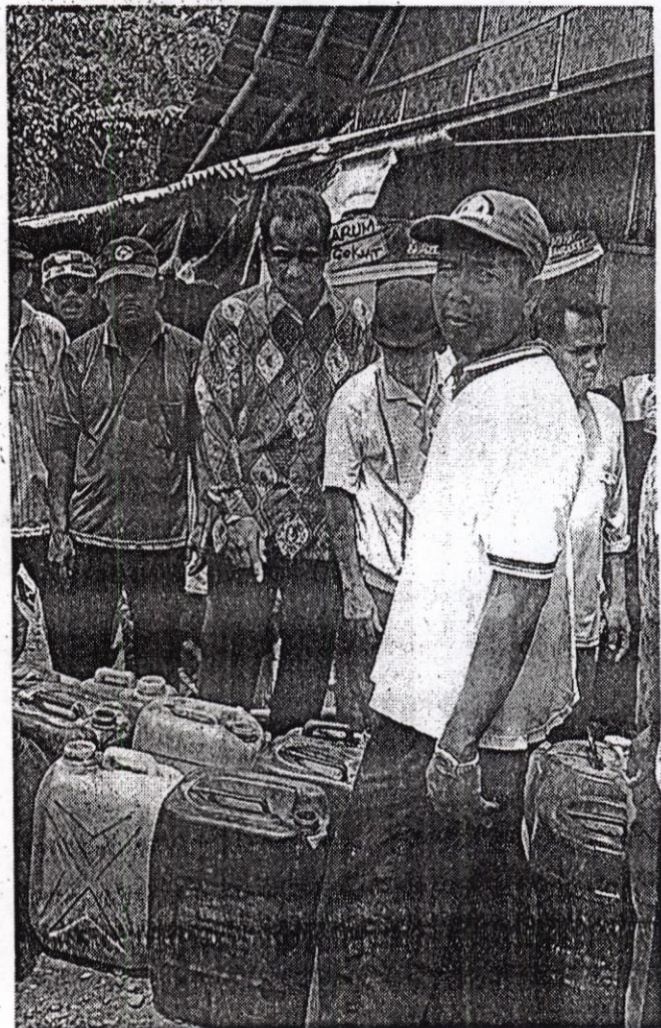
di desa tersebut hingga berjam-jam. Namun, para pemilik warung tidak diperbolehkan membeli, lebih dari dua puluh liter.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi B, H. Tono Bahtiar, mengaku kecewa terhadap kinerja Hiswana Migas yang terkesan membiarkan kelangkaan minyak tanah terus terjadi di Kab. Karawang. Padahal, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama yakni sekira satu bulan terakhir ini.

"Berdasarkan hasil pantauan kami, kelangkaan minyak tanah melanda kecamatan bagian utara, seperti Rengasdengklok, Jayakarta, Pakisjaya, Cibuaaya, Batujaya, dan Tirtajaya," ujarnya.

Menurut dia, saat ini Hiswana Migas kurang transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendistribusian minyak tanah yang dilakukan Hiswana tidak merata, sehingga terjadi kelangkaan di daerah-daerah tertentu.

Tono mengatakan, jika Hiswana Migas transparan, kelangkaan minyak tanah di Kab. Karawang tidak perlu terjadi. Mereka bisa berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk merumuskan pola pendistribusian yang tepat, sehingga tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan minyak tanah. (A-106)\*\*\*



DODO RIHANTO/PR\*

WARGA dan pemilik warung di Dusun Bojong Karya Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang sedang mengantre untuk mendapatkan minyak tanah, Selasa (7/11). Sejak beberapa pekan terakhir ini minyak tanah sulit didapat di beberapa kecamatan di Kab. Karawang.\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA			<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 4											TAHUN 2006																			

**Tender Kompor Gas Ditunda 2007**

JAKARTA - Tender pengadaan kompor gas dalam proyek konversi minyak tanah ke elpiji, yang kini masuk tahap pra kualifikasi, batal dilaksanakan tahun ini. Tender akan diulang lagi pada awal tahun 2007. "Pada saat ini dari soal teknis yang berkait hal teknis tidak memungkinkan kita lakukan 2006. Kita akan lakukan pada awal 2007. Ini soal teknis anggaran karena kalau salah bisa berabe. Dalam rangka kehati-hatian penggunaan anggaran maka 2006 ini tidak bisa kita lakukan," ujar Menkop dan UKM, Suryadharma Ali. Hal itu disampaikan Suryadharma, usai rapat koordinasi mengenai energi alternatif di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/11). Kementerian Koperasi ditugaskan untuk mengadakan proyek kompor gas ini, sebagai program konversi minyak ke elpiji untuk menekan penggunaan minyak. Tender terpaksa ditunda, karena sisa waktu yang tinggal dua bulan mengakibatkan tender tidak akan berjalan maksimal. (dte)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: VIII

TAHUN 2006

# Tender Kompor Gas Diulang



Sebentar lagi tabung kompor gas akan menggantikan kompor minyak tanah.

DALAM rangka mengganti pemakaian kompor minyak tanah yang boros, pemerintah mempromosikan pemakaian kompor gas. Karena itu, pemerintah mengulang lagi tender pengadaan kompor gas yang sebagian sudah dilakukan pada 2006, menjadi pada 2007.

"Kita tender lagi di 2007. Tender diulang tahun 2007 mulai dari tahap awal prakualifikasi karena memang aturannya begitu," kata Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan, dalam pengembangan energi alternatif, pihaknya ditugasi melakukan pengadaan kompor gas sebagai program konversi penggunaan kompor



Suryadharma Ali

minyak tanah menjadi kompor gas untuk menekan penggunaan minyak tanah.

"Tapi saat ini ada kendala teknis di mana pengadaan kompor gas tidak bisa dilakukan pada 2006 sehingga kita laku-

kan pada awal 2007. Ini soal teknis anggaran karena kalau salah bisa berabe," katanya.

Menurut dia, waktu yang tersedia saat ini hingga Desember 2006, tinggal beberapa hari lagi sehingga dari sisi anggaran tidak memungkinkan pengadaan kompor gas dilakukan pada 2006 ini.

"Bisa dibayangkan dari sekarang sampai Desember tinggal beberapa hari saja. Sedangkan kita mau menghabiskan uang Rp 60 miliar untuk 400.000 unit kompor gas. Jadi pabrik mana yang dalam waktu singkat bisa memproduksi sebanyak itu," katanya.

Ia menyebutkan, tender yang telah dilakukan saat ini baru memasuki tahap pertama, yaitu prakualifikasi yang diikuti 24 perusahaan. "Untuk masuk ke seleksi pemenang tender harus dipastikan bahwa anggarannya bisa dipakai, memang ada anggarannya, tapi waktu tak kondusif," jelas Suryadharma.

Mengenai anggaran, Suryadharma mengaku, tidak tahu anggaran 2006 sebesar Rp 60 miliar akan digunakan untuk apa. Namun untuk anggaran pengadaan kompor 2007, sudah ditetapkan anggarannya sebesar Rp 58,4 miliar.

"Minggu pertama 2007, tender sudah akan diumumkan. Jumlah kompornya tetap 400.000 unit untuk tahap awal untuk wilayah Jabotabek," kata Menkop. ■ AUL

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 17											TAHUN 2006																			

BISNIS MIGAS

## Swasta Minta Keringanan Syarat

### Berbisnis BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS — Badan usaha di luar Pertamina yang ikut mendistribusikan bahan bakar minyak bersubsidi kembali mengajukan keringanan persyaratan yang mewajibkan badan usaha minimal memenuhi kebutuhan dua wilayah distribusi niaga.

Dengan hak pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku hanya setahun, peraturan tersebut memberatkan pengusaha karena risiko yang harus ditanggung tidak sebanding dengan investasi yang mereka tanam.

Permintaan itu mengemuka dalam pertemuan pelaku usaha BBM dengan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (7/11).

Wakil Presiden Bidang Pengembangan Ritel Total Oil Indonesia Debut Kamajaya mengatakan, "Kalau syarat tidak diperlukan, sampai lima tahun yang akan datang pun tidak ada pemain yang bisa penuhi aturan itu."

Pemerintah membagi wilayah distribusi BBM menjadi empat, yaitu Sumatera (wilayah I), Jawa dan Bali (II), Kalimantan dan

Sulawesi (III), serta Papua dan Nusa Tenggara (IV).

Debut mengatakan bahwa pihak swasta mengharapkan paling tidak pemerintah dapat memecah wilayah distribusi niaga BBM menjadi wilayah yang lebih kecil.

Bagian Pengembangan Bisnis Petronas Niaga Indonesia Mariezka menyebutkan, para pengusaha mengharapkan kejelasan kebijakan pemerintah untuk rencana *public service obligation* (PSO).

"Agak sulit bagi kami kalau hak untuk pendistribusian BBM sub-

sidi itu hanya setahun. Kami paham bahwa ini terkait dengan anggaran pemerintah, tetapi agak sulit bagi pengusaha untuk menentukan skala keekonomian investasi," ujar Mariezka.

Deputi Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya menilai pemerintah sudah memberi keringanan kepada pihak swasta dengan kewajiban cukup hadir di dua dari empat wilayah niaga.

#### Pasokan avtur

Sementara itu, sejumlah perusahaan maskapai penerbangan mengharapkan agar ada perusahaan minyak swasta yang memasok avtur untuk pesawat. Selama ini pasokan avtur hanya dilakukan PT Pertamina.

"Bagi perusahaan penerbangan tentunya sangat positif jika ada swasta yang memasok avtur karena akan ada banyak alternatif, terutama soal harga," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Maskapai Penerbangan (Inaca) Tengku Burhanuddin.

Maskapai juga mengharapkan pola pembayaran avtur di belakang agar memudahkan operasional maskapai. (DOT/OTW)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

PSO BBM

TAHUN 2006

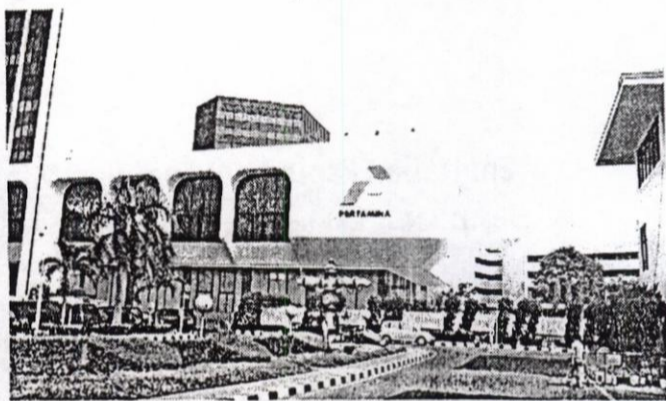
## Pertamina Kembali Ditunjuk

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah kembali menunjuk PT Pertamina (persero) sebagai pelaksana kewajiban pelayanan masyarakat (*public service obligation/ PSO*) untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2007. Penunjukan itu dilakukan karena belum ada badan usaha lain yang siap menjalankan penugasan tersebut.

"Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi 2007 karena memang badan usaha lain belum ada yang siap. Saat ini (badan usaha lain) belum memenuhi syarat, baik secara lelang maupun penunjukan langsung sesuai peraturan Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No 9 Tahun 2005," ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono se usai acara dengar pendapat publik (*public hearing*) mengenai PSO BBM bersubsidi di Jakarta, kemarin.

Kepastian untuk kembali menunjuk Pertamina sebagai pelaksana PSO BBM, menurut dia, didapat setelah melakukan dengar pendapat yang melibatkan badan usaha yang bergerak di bidang ritel BBM seperti Shell, Petronas, Sigma Rancang Persada (Gulf), Indonesia Petroleum Association (IPA), dan sejumlah investor yang berminat di bisnis tersebut. Tubagus menjelaskan, ketidaksiapan badan usaha lain tecermin dari ketidakmampuan mereka memenuhi persyaratan utama, yaitu memiliki fasilitas pendistribusian BBM ke seluruh pelosok Indonesia.

Tubagus menambahkan, meski Pertamina dipastikan sebagai pelaksana PSO BBM 2007, pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi untuk penetapan keputusan tersebut. BPH Migas, kata dia, menyiapkan sejumlah alternatif, antara lain penunjukan langsung Pertamina dengan *alpha* (biaya distribusi plus margin) yang ditetapkan pemerintah seperti yang



**KANTOR PUSAT:** Pemerintah kembali menunjuk PT Pertamina (persero) sebagai pelaksana kewajiban pelayanan masyarakat (*public service obligation/PSO*) untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2007. Tampak gedung kantor pusat Pertamina di Jakarta.

dilakukan pada tahun ini atau menunjuk langsung Pertamina selaku pelaksana PSO, tapi membolehkan juga badan usaha lain bekerja sama dengan BUMN migas tersebut dalam pelaksanaannya. "Kerja sama antara Pertamina dengan badan usaha lain bisa dilaksanakan melalui pendekatan bisnis," katanya.

Namun, di luar opsi tersebut, BPH Migas ternyata masih memiliki opsi tambahan. Anggota Komite BPH Migas Eri Purnomohadi menjelaskan, selain hal itu, BPH Migas juga menyiapkan alternatif penugasan lain, yakni penunjukan langsung ke seluruh badan usaha berdasarkan kuota tertentu dengan besaran *alpha* yang ditetapkan pemerintah atau BPH Migas menurut wilayah distribusi niaga. Atau, lanjut dia, penunjukan langsung ke seluruh badan usaha berdasarkan kuota tertentu dengan nilai *alpha* yang dilelang. Tapi, Eri mengakui, kedua opsi terakhir itu kemungkinan sulit dilaksanakan.

Eri menjelaskan, opsi itu didasarkan pada Peraturan Presiden No71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, yaitu BPH Migas dapat melakukan penun-

jukan langsung atau lelang dalam penyediaan BBM bersubsidi. "Untuk lelang hanya bisa dilakukan apabila badan usaha menguasai distribusi di dua WDN (wilayah distribusi niaga). Nah, hingga saat ini, tampaknya belum ada yang siap," katanya.

BPH Migas membagi wilayah pendistribusian BBM PSO dalam empat WDN, yakni WDN I Sumatra, WDN II Jawa dan Bali, WDN III Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya serta WDN IV Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Menanggapi penunjukan kembali Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa prinsip pemerintah dalam hal ini adalah kesamaan perlakuan (*equal treatment*) antarbadan usaha. Persyaratan yang dipenuhi Pertamina dalam menjalankan PSO BBM, tegas dia, juga harus dipenuhi badan usaha lain jika memang ingin menjalankan tugas tersebut.

"Badan usaha itu juga harus mau dapat tempat basah dan tempat kering seperti Pertamina saat ini. Dalam hal ini mesti ada persyaratan yang adil," tegasnya. (ahmad senoadi)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

**Eni Italia Eksplorasi Lapangan Migas Timor**

MILAN - Eni SpA menandatangani kontrak untuk mengeksplorasi lima lapangan minyak dan gas (migas) di wilayah Timor Leste.

"Perjanjian tersebut termasuk pengeboran delapan sumur dan survei-survei sumur seismik selama lima tahun pertama eksplorasi," kata pejabat perusahaan Eni seperti yang dilaporkan oleh The Associated Press, Selasa (7/11).

Eni menambahkan bahwa sebagai operator dari proyek ini Eni memiliki saham sebanyak 35%. Ini merupakan bagian dari pelelangan pengeboran lepas pantai oleh Pacific Nation.

Pemerintahan Timor menyatakan bahwa sebanyak 11 area telah ditawarkan dan penawaran telah ditutup pada 19 April 2006. (c94)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT **NOV** DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

## Pemprov Kepri Ingin Saham Blok Natuna

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ingin memiliki saham di perusahaan yang kelak mengoperasikan ladang gas Blok Natuna D-Alpha. Gubernur Ismeth Abdullah, kepada pers di Tanjungpinang, Senin (6/11) seperti dikutip *Antara* mengatakan, kepemilikan saham merupakan suatu keharusan.

Ismeth mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan soal penyertaan saham pemerintah daerah kepada tiga perusahaan dari Amerika Serikat dan Norwegia yang menemukannya.

Dia mengaku, keinginan Pemprov Kepri belajar dari kasus Blok Cepu di Jawa Tengah. Penyertaan saham daerah, menurut Ismeth, merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

**"Penyertaan saham daerah, merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat."**

• Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyampaikan tiga opsi pengelolaan Blok Natuna, berkaitan dengan kontrak Exxon Mobil yang dinyatakan *terminated*. Opsi pertama, membuka tender ulang. Kedua, menyerahkan pengelolaan blok tersebut kepada Pertamina dan opsi ketiga

yaitu, menyerahkan kembali pengelolaannya kepada ExxonMobil, namun dengan perjanjian serta syarat dan kondisi baru.

Menanggapi hal itu, Dirjen Migas Luluk Sumiarso mengatakan, keikutsertaan daerah terdapat dalam *participating interest* (PI) yang akan ditawarkan oleh perusahaan kontraktor, setelah ada keputusan atas tiga opsi dari pemerintah.

"Memang ada ketentuan-ketentuan kapan BUMD bisa mendapatkan PI sekitar 10 % seperti kasus Cepu yang diberikan pada waktu persetujuan POD (*plan of development, red*), yakni BUMD ditawarkan oleh kontraktornya untuk memiliki 10 % PI yang diberi batasan waktu dua bulan. Jika dalam dua bulan tidak ada yang berminat maka akan ditawarkan kepada perusahaan nasional. Kita tidak perlu minta, karena akan ditawari," kata Luluk. (es/c94)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 18											TAHUN 2006																			

**WAWANCARA**

Tantangan Pertamina,  
Tingkatkan Mutu



SINDO/ASTRA BOMBARDO

KURTUBI

PT Pertamina harus meningkatkan mutu produk dan kinerja layanan jika tidak ingin kehilangan konsumen domestik. Karena, seiring liberalisasi pengelolaan industri hilir minyak dan gas bumi (migas), pasar domestik mulai dirambah kalangan *retailer* asing yang sebelumnya dimonopoli

perusahaan pelat merah itu.

Karena itu, pengamat perminyakan Kurtubi menyarankan Pertamina tidak malu-malu mencontoh peningkatan mutu produk dan kinerja pelayanan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dikembangkan para pengelola dengan *branded* berbeda seperti Shell dan Petronas. Berikut ini petikan wawancara SINDO dengan Kurtubi.

**Apa tanggapan Anda atas dibukanya keran liberalisasi perminyakan di sektor hilir sehingga asing bisa bermain?**

Sebenarnya keterlibatan pihak asing sudah dimulai sejak dekade 1960-1970-an. Namun, karena harga minyak sangat murah dengan adanya subsidi pemerintah, mereka tidak bisa berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah *retailer* bahan bakar minyak (BBM) asing masuk di sektor hilir karena harga beberapa jenis BBM tertentu cukup tinggi dan tidak disubsidi sehingga memungkinkan pebisnis asing untuk ikut "bermain" kembali. Namun, dengan terbukanya peluang ini, saya menyarankan para pebisnis asing dapat melebarkan investasinya seperti dalam pengilangan dan angkutan BBM.

**Sejauh mana dampak positifnya?**

Kondisi ini dapat mendorong Pertamina meningkatkan kinerja, produk, dan pelayanannya. Selain itu, masyarakat juga akan mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan produk dan layanan terbaik.

**Bagaimana dengan eksese negatifnya?**

Dampak negatifnya adalah ruginya negara karena keuntungan dari sektor penjualan minyak ini dibawa ke luar oleh para pebisnis asing.

**Menurut Anda, bagaimana kesiapan Pertamina untuk bersaing dengan pebisnis asing?**

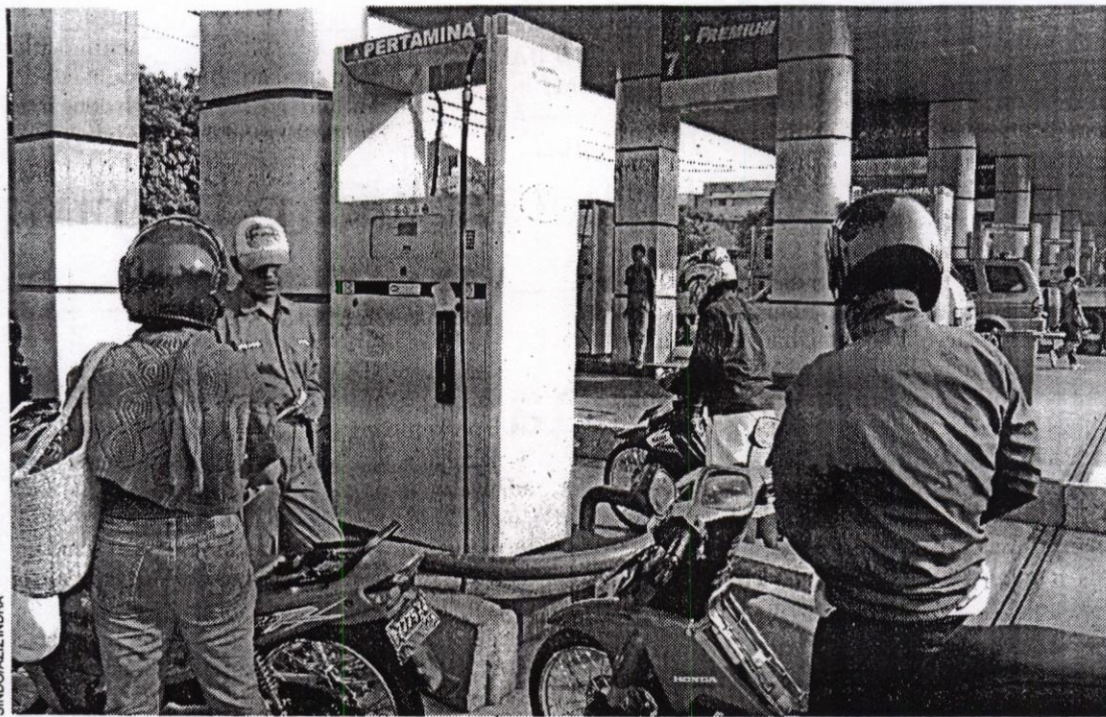
Saya kira Pertamina saat ini sudah sangat siap untuk bersaing dengan perusahaan mana pun, terutama asing. Meskipun Pertamina dihadang persoalan internal seperti korupsi, perusahaan migas itu sudah berpengalaman dan memahami betul konsentrasi konsumen serta memiliki jaringan infrastruktur luas di berbagai daerah.

**Anda ingin mengatakan bahwa produk Pertamina sudah bisa lebih unggul daripada produk perusahaan asing?**

Saya kira untuk bisa mencapai hal itu sangat mungkin. Dengan catatan, Pertamina mampu mempertahankan mutu produk dan layanannya yang sudah ada. Karena itu, saya menyarankan Pertamina agar segmen pasar Pertamina dan Pertamina Plus (jenis BBM yang tidak disubsidi) yang merupakan sumber utama laba mereka digarap secara serius. Namun, saya melihat Pertamina abai dalam hal ini. Pelayanan lebih juga harus diberikan kepada para konsumen. Karena itu, Pertamina jangan malu kalau harus meniru layanan istimewa Shell dan Petronas bagi konsumen. Saya khawatir, jika pelayanan Pertamina terus memburuk, tidak tertutup kemungkinan mobil mewah pengguna Pertamina dan Pertamina Plus ini "lari" ke SPBU-SPBU milik Shell dan Petronas. Ini kan merugikan mereka sendiri.

**Lokasi SPBU sering berdekatan satu dengan lainnya, perlukah regulasi khusus untuk menghindari benturan negatif?**

Saya kira tidak menjadi soal jika SPBU saling berdekatan, bahkan dengan merek perusahaan yang berbeda. Pasalnya, di satu sisi ini bisa memenuhi kebutuhan para konsumen yang banyak. Bisa memacu peningkatan mutu layanan yang harus mereka berikan kepada konsumen. Regulasi dalam hal ini tidak *urgent*. Jika SPBU tertentu tidak memberikan layanan maksimal, dia akan tutup sendiri. (CR03/muhammad iqbal)



SINDO/AZIZ INDHA

**JALUR GEMUK:** Suasana stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina. Pembangunan SPBU oleh swasta nasional atau asing diharapkan tidak hanya berkonsentrasi pada jalur gemuk.

operator SPBU dengan mudah mengendalikan takaran pembelian BBM konsumen. Modus operandi pertama yang sederhana terbilang paling sering dilakukan SPBU, beda dengan modus kedua sebagai modus kecurangan SPBU yang paling canggih, tapi jarang dilakukan.

Selain sulit mengungkap modus kecurangan SPBU, kelemahan penerapan regulasi di lapangan seolah menjadi jalan tol yang

memuluskan aktivitas kecurangan SPBU. Regulasi sebelumnya, yaitu UU No2 Tahun 1981 yang hanya mengenakan sanksi berupa kurungan satu tahun dan denda Rp1 juta, sering dianggap enteng para pengelola. Terlebih penerapan hukum yang tidak tegas. Yang berwenang ke-rap menangkap basah pelaku. Tapi, jarang atau bahkan tidak terdengar sama sekali adanya pelaku yang divonis di pengadilan.

Masalah lain adalah pemetaan lokasi SPBU. Tidak jarang pembangunan SPBU baru menimbulkan kesan bisnis tak sehat. Sebab, pendirian yang baru seakan ingin menjegal keberadaan yang lama. Apalagi jika melibatkan dua perusahaan minyak berbeda. Pertamina pun pernah mengeluhkan lokasi SPBU milik Shell yang keberadaannya bersinggungan.

(CR03/muhammad iqbal)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 18											TAHUN 2006																			

# Pertamina Tak Boleh Lengah

ANGKA pertumbuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bak cendawan di musim hujan menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) No22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Pasalnya, selain memangkas monopoli Pertamina sebagai salah satu BUMN yang mengelola sektor hilir, peraturan ini juga membuka peluang lebih besar bagi banyak pemilik modal lokal maupun asing bergelut di bisnis itu.

Sebagai perbandingan, selama 1998 sampai 2003, pertumbuhan jumlah SPBU terbilang sangat lambat. Tahun 1998, SPBU masih berjumlah 2.171 unit, kemudian meningkat menjadi 2.447 unit pada 2003. Memasuki 2004 pertumbuhan SPBU melonjak sebesar 16,7%. Hingga tahun lalu, SPBU telah mencapai 3.157 unit.

Pertumbuhan pesat bisnis SPBU tidak terlepas dari peningkatan konsumsi BBM. Pada 1999, konsumsi BBM baru mencapai 23,9 juta liter, lalu meningkat menjadi 30,7 juta liter pada 2004. Jumlah konsumsi itu terus melonjak seiring

meningkatnya kepemilikan kendaraan masyarakat.

Namun, tingginya tingkat pertumbuhan SPBU masih menyisakan ganjalan. Pertumbuhan pesat jumlah SPBU yang semestinya diimbangi kompetisi pelayanan yang lebih baik ternyata masih jauh dari harapan. Banyak SPBU yang melakukan kecurangan sehingga merugikan konsumen.

Pertengahan tahun ini, misalnya, tidak kurang dari 120 SPBU berbendera Pertamina terbukti melakukan kecurangan. Akibatnya, konsumen pengguna dari seluruh SPBU curang ini dirugikan tidak kurang dari Rp4,724 miliar.

Secara umum, ada dua modus operandi kecurangan SPBU. Modus pertama, memasang kawat logam semacam tusuk konde pada dispenser tangki SPBU. Akibatnya, takaran pembelian pada tera pengukur dapat dikendalikan. Modus kedua, dispenser pada tangki SPBU dihubungkan dengan sistem elektronik.

Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat kontrol semacam remote kecil sehingga

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT **NOV** DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

**KEPRI BATAM**

**Pemprov Minta Saham Exxon**

**PEM PROV** Kepri meminta kepemilikan saham kepada perusahaan asing yang mendapatkan hak pengelolaan eksplorasi gas di blok D Alfa Natuna. Saat ini, sudah tiga perusahaan multinasional yang bertemu Gubernur Kepri untuk membicarakan masalah eksplorasi di blok Natuna itu. Salah satunya, Exxon Mobil Oil. Demikian ungkap Gubernur Kepri Ismeth Abdullah di Tanjung Pinang, kemarin.

Selain Exxon Mobil Oil, ada dua perusahaan lainnya dari Norwegia dan negara lain. Semuanya bersedia memberikan kepemilikan saham kepada Pemprov Kepri. "Mereka (manajemen) sudah datang ke seni dan bertemu saya. Mereka bersedia memberikan saham kepada Provinsi Kepri," ungkap Ismeth Abdullah.

Ismeth tidak ingin mendahului keputusan pemerintah pusat, meskipun manajemen perusahaan eksplorasi gas di Natuna itu bersedia memberikan sahamnya kepada Pemprov Kepri. Sebab, siapa pun yang akan ditunjuk oleh pemerintah, Pemprov Kepri tidak masalah. (saibansah)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2006

## Penggunaan Gas Untuk Pembangkit Terkendala Ketidakpastian Pasokan

JAKARTA — Penggunaan gas untuk pembangkit listrik guna mendapatkan energi yang murah dan bersih menghadapi kendala pasokan gas yang tidak stabil bahkan cenderung menurun di dalam negeri.

Direktur Pengkajian Energi UI, DRB Widodo Purwanto, di Jakarta, Selasa mengatakan pasokan gas yang tidak stabil itu akan mengganggu program penurunan penggunaan BBM ke gas untuk menekan subsidi bagi pembangkit listrik yang ada di Indonesia.

Ia mengatakan masalah tersebut terkait dengan masih minimnya infrastruktur transportasi gas untuk memenuhi permintaan, disamping ketidakberpihakan pemerintah yang tegas soal penggunaan gas untuk kepentingan domestik. "PLN (Perusahaan Listrik Negara) barangkali mau saja (beralih) ke gas karena nilai harga per kalori gas lebih murah dibanding BBM, tapi karena infrastruktur belum memadai, sulit," katanya.

Ia menilai penggunaan gas untuk pembangkit listrik sangat tepat terutama di Jawa yang padat penduduknya. Karena gas tidak hanya menghasilkan energi yang murah dibandingkan BBM tapi juga bersih sehingga mengurangi polusi dibandingkan BBM maupun batubara.

"Kalau batubara emisi dan

polusinya tinggi, karbondioksida dan emisi-emisi lainnya juga tinggi, sedangkan gas paling bersih dan tren di dunia juga menggunakan gas untuk pembangkit untuk menekan polusi," kata Widodo.

Selain itu, katanya, pembiayaan pembangkit gas juga lebih murah dibandingkan BBM maupun batubara jika dihitung mulai dari biaya investasi modal (capital expenditure), biaya operasional dan pemeliharaan, dan penggunaan bahan bakarnya.

"Dari data literatur yang saya miliki investasi untuk batubara mencapai 1.125 dolar AS per KWe (Kilo Watt electric), sedangkan turbin gas investasinya sekitar 800 dolar AS per KWe. Tapi dengan catatan bukan pembangkit listrik buatan Cina yang digunakan, tapi dari Eropa dan Amerika," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, bila pemerintah ingin mendapatkan energi listrik yang murah dan bersih, maka perlu dibangun infrastruktur gas di negara kepulauan ini dengan memadai, baik berupa pembangunan pipanisasi, pabrik dan terminal LNG, maupun infrastruktur pelabuhan untuk membawa gas dengan kapal.

Ia mengatakan pihaknya memiliki literatur mengenai skala ekonomis pengangkutan gas, misalnya distribusi gas ke pengguna di atas 3.000 km lebih ekonomis menggu-

nakan LNG, sedangkan di bawah 3.000 km lebih ekonomis menggunakan pipa.

"Bila pemerintah ingin mendapatkan energi murah dan banyak namun mengabaikan aspek lingkungan, maka batubara bisa jadi pilihan utama. Tapi bila ingin murah dan bersih, gas merupakan bahan bakar yang tepat, namun infrastrukturnya harus dibangun," katanya.

### Perhatikan

Sementara itu, Juru Bicara PLN Mulyo Adji mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk menggunakan gas bagi pembangkit listrik yang dimilikinya lebih banyak lagi.

"Bila gas nya 'available' (tersedia), tentu PLN akan memakainya secara maksimal, termasuk untuk pembangkit minyak (BBM) yang bisa dimodifikasi menjadi pakai gas," ujarnya.

Namun, lanjut dia, kenyataan di lapangan pasokan gas di dalam negeri sangat memprihatinkan. Mulyo mengatakan pada tahun ini saja realisasi penggunaan gas hanya 20 persen dibawah rencana tahunan perusahaan (RKAP).

"Sejak Tahun 2000 sebenarnya PLN sudah menunggu gas untuk PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tambaklorok, dan PLTGU Grati, namun sampai sekarang belum mendapatkan pasokan gasnya," katanya. ■ ant/fir

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OPEC has 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2006

## OPEC has no price floor to defend

The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) doesn't have a specific price floor or band that it wants to defend, the group's president said Tuesday.

"OPEC doesn't have a rigid floor," Edmund Daukoru, who is also Nigeria's petroleum minister, said at an oil industry conference in Seoul.

Setting a target price band "is not really applicable to the fluid, free market," he said.

Recent falls in global oil prices have prompted the crude market to speculate on the price level that the group might defend.

Daukoru said Monday that current prices are low, which may lead to a decision to further cut production when OPEC meets in December.

OPEC decided last month at a meeting in Qatar to cut production by 1.2 million barrels a month.

Oil prices have retreated significantly from a summertime high above US\$78 a barrel, trading in a range of around \$57-\$61 a barrel over the past month as traders look for demand clues in weather and economic forecasts and weigh them against OPEC's plans to curb supplies.

Light sweet crude for December delivery rose 3 cents to \$60.05 a barrel in midmorning Asian electronic trading Tuesday on the New York Mercantile Exchange. Prices jumped 88 U.S.cents in Monday's trading after armed protesters shut down a Nigerian oil pumping station. — AP

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	(NOV)	DES
1	2	3									
HALAM											
TS											

# Asing bisa salurkan solar & premium tanpa subsidi

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengizinkan badan usaha asing ikut menjual BBM *public service obligation* (PSO) jenis premium (RON88) dan solar tanpa disubsidi.

Khusus minyak tanah bersubsidi pendistribusiannya masih dilarang dan hanya Pertamina yang boleh menyalurkan.

Hal tersebut merupakan hasil rekomendasi BPH Migas sesuai melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di penyaluran dan pendistribusian BBM seperti Pertamina, Shell, Petronas, Total, Walinusa, Elnusa, Petroniaga, PT AMS dan AKR Corporindo Tbk di Jakarta, kemarin.

Rekomendasi akan diteruskan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan peraturan yang mengizinkan pendistribusian BBM PSO oleh badan usaha asing tanpa disubsidi.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan dalam Perpres No. 71/2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu, pemerintah menetapkan tiga jenis BBM yang disubsidi yaitu premium (RON 88), solar, dan minyak tanah.

"Karena itu, perlu dibuat aturan baru untuk mengizinkan badan usaha yang baru, selain Pertamina, untuk dapat mendistribusikan BBM jenis premium dan solar dengan harga yang tidak disubsidi," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapat *Bisnis*, hari ini rencananya akan diadakan rapat khusus menyangkut rencana pemberian izin bagi badan usaha asing untuk menyalurkan BBM sekelas premium dan solar tanpa subsidi di Ditjen Migas pada Departemen ESDM.

Menurut perhitungan Tubagus, dengan harga minyak dunia yang memiliki kecenderungan terus turun hingga di bawah US\$60 per barel, maka harga jual premium tanpa subsidi bisa mendekati Rp4.600 per liter.

Harga premium bersubsidi saat ini berdasarkan Perpres No. 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu ditetapkan Rp4.500 per liter atau hanya selisih Rp100 per liter.

Dengan harga tersebut, diperkirakan badan usaha asing memiliki peluang untuk berkompetisi memasarkan premium tanpa subsidi, sementara Pertamina menjual premium dengan subsidi.

Sebagai perbandingan, harga jual Pertamina (Oktan 95) jika dibandingkan dengan Shell Super Extra (Oktan 95) di SPBU milik Pertamina yang letaknya bersebelahan dengan SPBU Shell hanya lebih murah Rp100 per liter.

## Menjanjikan

Menanggapi pemberian izin tersebut, Wakil Presiden Shell Indonesia Bidang Eksternal dan Urusan Bisnis Wally Saleh mengatakan pasar BBM PSO merupakan pasar yang sangat menjanjikan.

"Kalau dalam bisnis memang kalau kita hanya menjual *high octane* [92 dan 94] pasarnya kecil, kalau mau berkembang harus di pasar yang lebih besar karena itu kami ingin masuk ke pasar BBM PSO," ujarnya ketika dimintai pendapatnya menyangkut pemberian izin pemasaran pre-

## BBM bersubsidi dalam APBN 2007

Jenis	Volume (Juta kiloliter)
Premium	17
Solar	11
Minyak tanah	9,9
BBM non-subsidi	22,1
Total kebutuhan dalam negeri	60

Sumber: BPH Migas

mium dan solar tanpa disubsidi.

Selama ini, lanjutnya, Shell Indonesia memang tidak menjual premium karena disparitas harga antara harga pasar premium dengan harga bersubsidi cukup jauh.

Menyangkut hitungan Tubagus bahwa disparitas harga tersebut kini semakin tipis setelah harga minyak dunia turun, Wally mengatakan akan memperhitungkan secara cermat kemungkinan itu.

"Kita akan hitung detailnya, informasi ini akan kita bahas di internal," katanya.

Sementara, Vice President Retail Development Total Oil Indonesia Debut Kamajaya mempertegas keinginan badan usaha untuk terlibat menyalurkan BBM PSO dan meminta peraturan wajib memiliki jalur distribusi di dua wilayah niaga dikaji ulang.

Presiden Direktur PT Petronas Niaga Indonesia Kamarulzaman Mohd Hashim yang akan diminta pendapatnya saat pertemuan kemarin justru menghindari kejaran beberapa wartawan dan tidak mengeluarkan sepatah katapun.

Sejumlah badan usaha yang telah mendapatkan izin di sektor hilir migas adalah Shell, Petronas, Gulf Oil dan AKR. Rencananya akan menyusul Total dan Singapore Petroleum Corporation. (*dwi.djanuarto@bisnis.co.id*)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2006

# Pertamina Siap Kerja Sama BBM Bersubsidi

## BPH Migas sedang mengkaji penunjukan langsung Pertamina.

JAKARTA — PT Pertamina (Perse-ro) menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan badan usaha lain dalam pengadaan BBM bersubsidi tahun 2007. Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, pelaksanaan pengadaan BBM bersubsidi sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kita siap saja bekerja sama dengan badan usaha lain apakah Shell, Petronas atau lainnya," katanya usai dengar pendapat publik (public hearing) BPH Migas mengenai pengadaan BBM bersubsidi tahun 2007 yang dihadiri sejumlah perusahaan di sektor hilir migas di Jakarta, Selasa (7/11).

Menurut Hanung, sejumlah perusahaan seperti Shell dan Petronas sudah lama menyatakan keinginannya bekerja sama dalam pengadaan BBM bersubsidi. "Kita *welcome* karena bisa saling menguntungkan," ujarnya.

BPH Migas sedang mengkaji penunjukan langsung kepada Pertamina dalam pengadaan BBM bersubsidi tahun 2007 dengan memberi kesempatan badan usaha lain bekerja sama dengan BUMN itu secara *b to b*.

Pada tahun 2007, pemerintah kemungkinan besar masih akan menunjuk langsung Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi mengingat badan usaha lain belum ada yang siap.

Tahun lalu, Pertamina juga ditunjuk langsung sebagai satu-satunya badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi dengan besaran alpha (biaya distribusi dan margin) ditetapkan pemerintah.

Dalam *public hearing* itu juga diketahui, sampai saat ini belum ada badan usaha selain Pertamina yang memenuhi persyaratan baik penunjukan langsung maupun lelang sesuai Peraturan BPH Migas No 09 Tahun 2005 khususnya ketersediaan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

Meskipun, dalam forum itu sejumlah badan usaha selain Pertamina menyatakan keinginannya ikut serta menyalurkan BBM bersubsidi.

Sesuai Perpres No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, BPH Migas dapat melakukan penunjukan langsung atau lelang dalam penyediaan BBM bersubsidi.

Namun, sesuai Peraturan BPH Migas No 09 Tahun 2005, baik pengadaan BBM bersubsidi yang melalui penugasan langsung ataupun lelang, badan usaha yang berminat diwajibkan menguasai dua wilayah distribusi niaga (WDN).

"Hingga saat ini, tampaknya belum ada menguasai dua WDN, sehingga Pertamina akan menyalurkan BBM bersubsidi lagi tahun 2007," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.

BPH Migas membagi wilayah pendistribusian BBM bersubsidi dalam empat WDN yakni I adalah Sumatera, II untuk Jawa dan Bali, III untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya, serta IV yakni NTT dan NTB.

### Revisi

Dalam *public hearing* tersebut muncul pula keinginan agar BPH Migas merevisi persyaratan penguasaan dua WDN itu.

Anggota Komite BPH Migas Eri Purnomohadi menyatakan, pihaknya bersedia mengkaji kembali peraturan mengenai persyaratan badan usaha dalam penyaluran BBM bersubsidi.

"Hanya saja, revisi aturan itu tidak bisa dilakukan saat ini, karena harus melalui pembahasan yang cukup panjang. Kemungkinan baru bisa diterapkan tahun 2008," katanya. ■ ant/fir

### Ikhtisar

- Sejak dua tahun lalu sejumlah perusahaan migas asing menyatakan minatnya dalam pengadaan BBM bersubsidi.
- Shell dan Petronas, telah menyatakan kesanggupannya.
- Sejauh ini pemerintah masih menunjuk Pertamina.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT **NOV** DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2006

# BUMN India Ekspansi ke Indonesia

## Investasi Jepang Kembali

**JAKARTA (Media):** Badan usaha milik negara (BUMN) India mulai melebarkan sayap bisnisnya ke Indonesia. Melalui Indian Oil Corporation Limited (IOCL), perusahaan ini mengincar untuk melego saham perusahaan petrokimia Indonesia PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI).

Hal ini terungkap dalam laporan Atase Industri dan Perdagangan Indonesia untuk India yang diterima *Media Indonesia*, kemarin di Jakarta. "Indonesia mengimpor dalam jumlah besar produk aromatik seperti *benzene, toluene, xylene, dan poly-propylene*. Saat ini IOCL sedang ekspansi di bidang industri petrokimia sehingga proposal ini sejalan dengan rencana globalisasi IOCL," ungkap satu pejabat senior IOCL mengutip laporan itu.

Untuk menjalankan rencananya, IOCL telah menggandeng PT Medco Energi International Tbk (Medco). Mereka akan melakukan eksplorasi dan produksi industri minyak di India, Indonesia, dan beberapa negara lain.

Proyek pertama yang bakal digarap adalah pembangunan penyulingan di Indonesia. "Medco sedang merencanakan proyek *refinery* di Indonesia dan IOCL berminat untuk berpartisipasi," masih menurut pejabat IOCL.

Terkait dengan rencana mengambil alih PT TPI, IOCL kini sedang merancang satu proposal. Proposal itu nantinya akan diajukan kepada direksi perusahaan untuk mendapat persetujuan. IOCL mengaku sangat tertarik dengan PT TPI yang saat ini mempunyai aset senilai US\$3 miliar. Saat ini, 70% saham PT TPI dikuasai pemerintah Indonesia dan sisanya dikuasai berbagai perusahaan. Di antaranya, PT Pertamina, Itochu Corporation, Tuban Petrochemicals Pte Ltd (anak perusahaan konglomerat Thailand Siam Cement PCL), dan Sojitz Corporation (anak Nissho Iwai Corporation).

Menanggapi rencana itu, Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyatakan belum berencana untuk melepas kepemilikan 70% saham di proyek PT TPI. Wakil Direktur Utama PPA Raden Pardede menyatakan PPA harus menunggu persetujuan

dari Menteri Keuangan perihal penetapan harga jual aset PT TPI terlebih dahulu, sebelum melepas aset itu ke investor.

### Reinvestasi Jepang

Sementara itu, pemerintah Jepang berminat mengembalikan investasi ke Indonesia untuk empat sektor, yakni elektronik, otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), ser-

ta industri komponen. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua pemerintah sepakat untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia melalui pembentukan rencana kerja investasi strategis (*strategic investment action plan/SIAP*) oleh Komite Perencanaan dan Koordinasi Forum Kerja Sama Investasi Indonesia-Jepang.

"Pertemuan kali ini mengagenda evaluasi berbagai kemajuan langkah pembahasan hasil kerja seluruh kelompok kerja. Semua kelompok kerja telah sepakat atas kriteria penilaian masing-masing rencana aksi. Hanya pada kelompok kerja perpajakan yang masih memerlukan pembahasan lanjutan," papar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin (6/11) malam.

Lebih lanjut Mari menambahkan, semua kemajuan tersebut nantinya akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi kedua pemimpin negara.

Rencananya Presiden Yudhoyono akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang pada akhir bulan ini. Hal ini merupakan langkah untuk mengejar target peningkatan investasi Jepang di Indonesia yang sudah disepakati kedua kepala pemerintahan.

Forum kerja sama ini memiliki empat kelompok kerja yang terdiri atas kelompok kerja perpajakan dan kepabeanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, serta daya saing dan UKM. (TM/AN/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

**BBM BERSUBSIDI**

# BPH Migas akan Cabut Monopoli Pertamina



Tubagus Haryono

**JAKARTA (Media):** Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) membuka kesempatan kepada badan usaha lain untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Selama ini kegiatan itu dimonopoli oleh Pertamina.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengemukakan hal itu kepada wartawan di sela-sela forum dengar pendapat tentang BBM PSO (kewajiban layanan publik), di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, ujar Tubagus, Pertamina dipastikan tetap memegang hak penyaluran BBM bersubsidi tahun depan. Menurut Tubagus, selama ini, selain Pertamina belum ada badan usaha yang memiliki kesiapan ataupun memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsi PSO menyalurkan BBM bersubsidi pada 2007.

Berdasarkan peraturan BPH Migas No 9/2005, suatu badan usaha bisa mengikuti lelang PSO BBM bersubsidi atau ditunjuk langsung bila telah membuka stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di dua wilayah distribusi dan niaga (WDN).

"Badan usaha selain Pertamina berkeinginan ikut serta menyalurkan BBM PSO. Mereka minta persyaratannya direvisi, terutama mengenal dua wilayah distribusi itu. Tapi revisi seperti itu tidak bisa dilakukan segera," ujarnya.

Sebagai jalan tengah, BPH

Migas menyiapkan sejumlah alternatif dalam penunjukan langsung Pertamina untuk penyaluran BBM bersubsidi 2007. Salah satunya adalah Pertamina tetap ditunjuk namun badan usaha lain dapat melakukan kerja sama dengan Pertamina itu secara bisnis.

Opsi yang lain adalah penunjukan langsung ke Pertamina dengan besaran *alpha* (biaya distribusi dan margin) ditetapkan pemerintah. Alternatif itu telah diterapkan terhadap Pertamina pada 2006 ini.

Opsi ketiga, penunjukan langsung ke Pertamina yang besaran *alpha*-nya ditetapkan pemerintah, namun badan usaha lain diizinkan menjual BBM PSO tanpa subsidi.

Tubagus menyatakan, BPH Migas akan mengevaluasi minat dan kesiapan badan usaha untuk bekerja sama dengan Pertamina. Selanjutnya, menetapkan opsi yang akan dijalankan.

Anggota Komite BPH Migas Eri Purnomohadi mengungkapkan, di samping ketiga opsi, BPH Migas juga mempertimbangkan alternatif penugasan lain yakni penunjukan langsung ke seluruh badan usaha. Setiap badan usaha yang ditunjuk akan ditugasi menyalurkan BBM bersubsidi berdasarkan kuota tertentu dengan besaran *alpha* ditetapkan pemerintah atau BPH Migas menurut WDN masing-masing.

"Atau, penunjukan langsung ke seluruh badan usaha berdasarkan kuota tertentu dengan nilai *alpha* yang dilelang. Tetapi, opsi-opsi itu sulit dilaksanakan," ujarnya.

Sesuai Perpres No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, BPH Migas dapat melakukan penunjukan langsung atau lelang dalam penyediaan BBM bersubsidi. (Ndy/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

## CAKRAWALA

### Oman Ingin Tingkatkan Produksi Minyak

■ SANA'A - Menteri Minyak dan Gas Oman, Mohamed Bin Hamad Al-Ramhi, Senin (6/11), menyatakan keinginan negaranya untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak hingga sejuta barel per hari. Menurut Al-Ramhi seperti dikutip pers setempat, negaranya saat ini sedang memproses peningkatan hingga 900.000 barel. "Namun, keinginan kami sebenarnya adalah bisa menjadi sejuta barel per hari," katanya. Ia menilai harga minyak dunia saat ini logis berkisar antara 50-60 dolar per barel yang menguntungkan produsen dan konsumen sekaligus. Karenanya ia menegaskan bahwa negaranya tidak berniat mengurangi produksi minyak mentah. (ant/dpa/dwi)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 12											TAHUN 2006																			

## EU, Baku sign energy partnership pact

The European Commission (EC) has signed an accord to create an energy partnership with Azerbaijan as part of the bloc's efforts to secure its gas and oil imports, the EU executive said Tuesday.

"The implementation of the memorandum of understanding will allow better integration of Azerbaijan to EU energy markets and strengthen EU energy security thanks to supplies from the Caspian Basin,"

Commission President Jose Manuel Barroso told reporters after talks with Azerbaijan President Ilham Aliyev.

Barroso said the partnership would allow development of more efficient energy demand management in Azerbaijan and the exchange of technical expertise.

"I want to underline this idea of creating more security of energy supply for Europe because of supplies coming from the Caspian Basin."

The European Union (EU), which relies heavily on gas and oil imports, has sought to diversify its supplies since last winter when a pricing dispute between Russia and Ukraine had the knock-on effect of briefly disrupting supplies to Europe.

Oil generates around half of Azerbaijan's gross domestic product, forecast at about US\$25 billion in 2007, but it is expected to dry up between 2020 and 2030. — Reuters

2-

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA			<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

PUBLIC SERVICE OBLIGATION

# Syarat Pendistribusian BBM Bersubsidi Hanya Bisa Dipenuhi Pertamina

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyatakan, hanya PT Pertamina (Persero) yang memenuhi persyaratan untuk memonopoli penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2007. Ini diakibatkan belum ada badan usaha lain ada yang siap memenuhi syarat yang ditetapkan.

Kepastian Pertamina mendapatkan penugasan *public services obligation* (PSO) itu setelah dilakukan *public hearing* antara BPH Migas dengan badan usaha seperti Shell, Petronas, Sigma Rancang Persada (Gulf), Indonesia Petroleum Association (IPA), dan sejumlah investor yang berminat di bisnis retail BBM.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, pada tahun 2007 pemerintah kemungkinan masih akan menunjuk Pertamina sebagai penyalur BBM bersubsidi. "Karena, memang badan usaha lain belum ada yang siap," kata Tubagus di sela *public hearing* BBM PSO di Jakarta, Selasa (7/11).

Namun pihaknya menyiapkan se-

jumlah alternatif dalam penunjukan langsung penyaluran BBM bersubsidi ke Pertamina tersebut.

"Pertamina ditunjuk langsung, tapi alphanya ditetapkan pemerintah. Badan usaha lain diizinkan menjual BBM PSO tanpa disubsidi," kata Tubagus.

Sesuai Perpres No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung atau lelang dalam penyediaan BBM bersubsidi.

"Untuk lelang hanya bisa dilakukan apabila badan usaha menguasai distribusi di dua wilayah distribusi niaga (WDN). Hingga saat ini, tampaknya belum ada yang siap," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, BPH Migas membagi wilayah pendistribusian BBM PSO dalam empat wilayah niaga. Wilayah I meliputi Sumatera, wilayah II untuk Jawa dan Bali, wilayah III Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya, serta wilayah IV NTT dan NTB.

Di tempat terpisah, Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Pertamina dan pemain lain harus disetarakan kualifikasinya.

Purnomo meminta BPH Migas untuk memberlakukan perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi Pertamina maupun swasta yang hendak mengikuti tender hak penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam rangka PSO pada tahun 2007 yang akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Menurut Purnomo, siapapun yang akan mengikuti tender hak penyaluran tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang selama ini telah dilakukan Pertamina.

"Prinsipnya harus *equal treatment*. Misalnya Pertamina bangun *storage*, swasta juga. Kalau ternyata dia (swasta) tidak punya *storage* tapi ikut tender, itu tidak *fair*. Terus swasta harus memiliki 2 wilayah distribusi di Jawa dan luar Jawa," kata Purnomo usai acara Konvensi Nasional "Sistem Kompetensi Profesi Bidang Geologi dan Pertambangan di Gedung ESDM Jakarta, Selasa (7/11). (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

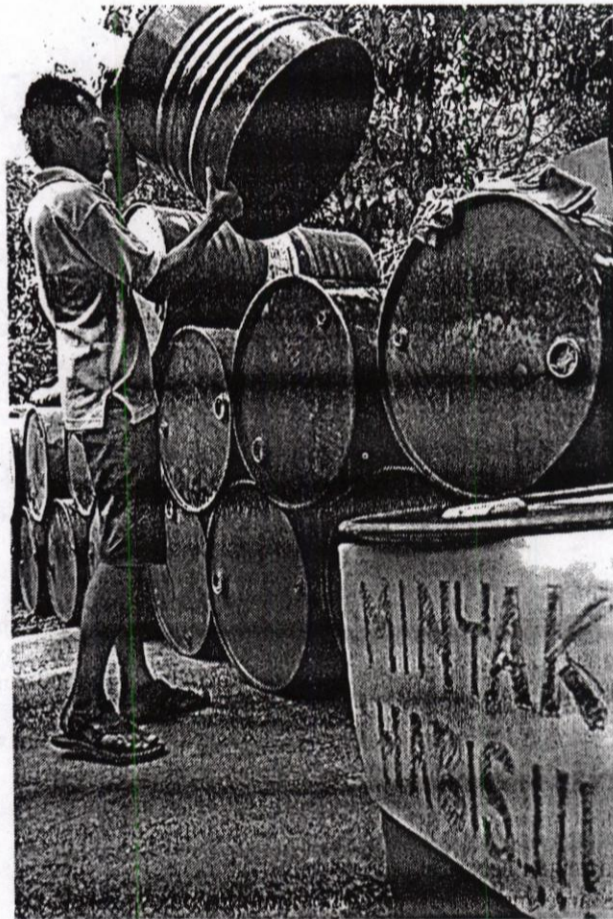
MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2006



BISNIS/ANDRY T. KURNIADY

**KELANGKAAN MINYAK:** Sebuah pengumuman dipasang di salah satu agen minyak tanah di Depok, Jawa Barat, kemarin. Menurut sebagian besar warga, kelangkaan minyak tanah dirasakan sejak awal Ramadan, jatah 5.000 liter setiap minggu di tingkat agen masih belum bisa mengatasi tingginya permintaan di masyarakat.



rah lokasi WK panas bumi.

"Ini dilakukan menyusul era otonomi daerah dengan keluarnya UU No19 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah," jelasnya.

Menurut Purnomo, mekanisme tender dan persyaratan peserta tender akan diatur dalam PP yang saat ini telah diselesaikan drafnya dan telah masuk ke Sekretariat Negara.

PP tersebut, kata dia, nantinya akan menjadi implementasi pelaksanaan UU No23 Tahun 1971 tentang Panas Bumi. Potensi pengembangan panas bumi di Indonesia, tegas dia, masih demikian besar dengan perkiraan cadangan mencapai 27 ribu MW dan baru termanfaatkan sekitar 800 MW.

"Potensi panas bumi seperti di Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatra Barat, potensinya demikian besar. Bayangkan, 40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia, tapi yang termanfaatkan masih di bawah 1.000 MW," katanya.

Karena itu, lanjut dia, pekan depan Departemen ESDM akan

mengundang investor panas bumi untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan guna mempercepat pengembangan potensi yang ada. Menanggapi hal itu, Suryadharna mengatakan pihaknya setuju diadakan forum untuk saling mengetahui kendala pengembangan panas bumi tersebut. Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dibahas bersama dengan pemerintah.

Dia mencontohkan, masalah mekanisme tender yang baru oleh daerah. Dia mengatakan, pihaknya setuju tender dilakukan daerah. Namun, dalam hal ini pihak yang akan terlibat akan bertambah banyak, yaitu bupati, gubernur, dan pusat. Karena itu, tegas dia, mekanisme tender harus dipertegas dengan menentukan pihak mana yang paling berwenang dalam proses itu. Dia mengatakan, tanpa ketegasan dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, misalnya jika lokasi WK berada di perbatasan-perbatasan antara kabupaten atau di lintas provinsi.

(ahmad senoadi)